

## **Pengaruh Inflasi terhadap Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah melalui Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebagai Variabel Intervening di Kota Pekanbaru Tahun 2011-2023**

**Raja Aisyah Fahira Rahimi, Syapsan, Darmayuda**

*Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Riau, Kota Pekanbaru, Indonesia*

### **Kata Kunci**

**Kata kunci:** Inflasi, PDRB, Pajak daerah, Retribusi daerah, Analisis jalur, Pekanbaru

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh inflasi terhadap penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah dengan Product Domestic Regional Bruto (PDRB) sebagai variabel intervening di Kota Pekanbaru pada tahun 2011-2023. Penelitian ini menggunakan data inflasi yang cenderung fluktuatif dalam 13 tahun terakhir sebagai variabel independen, PDRB sebagai variabel intervening yang memiliki tren meningkat dalam pertumbuhannya, kemudian variabel pajak daerah yang memiliki tren meningkat dalam 13 tahun terakhir dan variabel retribusi daerah dengan tren menurun dalam 13 tahun terakhir. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan analisis jalur (*path analysis*) berdasarkan data 2011-2023. Penelitian ini menemukan bahwa pengaruh langsung inflasi terhadap pajak daerah dan retribusi daerah lebih besar dibandingkan pengaruh tidak langsung dengan menggunakan PDRB sebagai variabel intervening dengan analisis jalur.

### **Keywords**

**Keywords:** Inflation, Regional Tax, Regional Retribution, Gross Regional Domestic Product (GRDP), Path Analysis, Pekanbaru.

### **Abstract**

This study investigates the impact of inflation on regional tax revenue and regional retribution revenue, with Gross Regional Domestic Product (GRDP) as an intervening variable, in Pekanbaru City from 2011 to 2023. Employing a quantitative approach with path analysis, the research utilizes secondary data on inflation, GRDP, regional tax, and regional retribution. The results reveal that while inflation exerts a direct influence on both regional tax and retribution revenues, its indirect effect through GRDP is relatively weaker. Furthermore, the study highlights divergent trends, where regional tax revenue demonstrates consistent growth, whereas regional retribution revenue shows a declining pattern over the 13-year period. These findings provide empirical insights into the fiscal dynamics of local governments, emphasizing the dominant role of inflation in shaping regional revenue performance.

\*Corresponding Author: **Raja Aisyah Fahira Rahimi**, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Riau, Kota Pekanbaru, Indonesia  
Email: [raja.aisyah3896@student.unri.ac.id](mailto:raja.aisyah3896@student.unri.ac.id)

**DOI:** <https://doi.org/10.29303/jseh.v11i3.889>

**History Artikel:**

Received: 15 Agustus 2025 | Accepted: 29 September 2025

## PENDAHULUAN

Inflasi merupakan salah satu masalah utama yang dapat mengancam keadaan ekonomi suatu daerah atau negara. Fenomena moneter ini terus menerus mengancam perekonomian karena seringkali solusi yang ada dapat mengakibatkan dua persoalan yang akan memperbaki atau malah memperburuk pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Inflasi merupakan salah satu faktor yang berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi yang ditandai dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) suatu daerah. Makro ekonomi yang stabil juga merupakan hal penting dalam menjaga pertumbuhan ekonomi di suatu daerah. Semakin banyak jumlah uang beredar dan meningkatkan pendapatan perkapita masyarakat maka akan mendorong terjadinya inflasi. Inflasi adalah salah satu faktor yang dipertimbangkan oleh pemerintah Kota Pekanbaru dan pelaku ekonomi saat membuat kebijakan dan pengambilan keputusan. Karena inflasi dapat memberi banyak dampak pada variabel-variabel ekonomi Pekanbaru merupakan salah satu kota yang ada di Indonesia yang mengalami permasalahan inflasi. Perkembangan inflasi yang terjadi pada suatu daerah ialah salah satu tolak ukur baik buruknya masalah ekonomi yang dihadapi suatu daerah tersebut. Berikut merupakan perkembangan inflasi tahunan di Indonesia dan Kota Pekanbaru pada periode tahun 2011-2023.

Tabel 1.1. Inflasi Indonesia dan Kota Pekanbaru Tahun 2011-2023

Tahun	Inflasi (%)	
	Indonesia	Kota Pekanbaru
2011	5,38	4,09
2012	4,28	3,30
2013	6,40	8,83
2014	8,36	8,53
2015	6,38	2,71
2016	3,53	4,19
2017	3,81	4,07
2018	3,20	2,54
2019	2,72	2,56
2020	1,68	2,24
2021	1,87	1,55
2022	5,51	7,04
2023	2,61	2,50
Rata-rata	4,28	4,16

Sumber : Badan Pusat Statistik

Pada data tersebut dapat dilihat bahwa inflasi tertinggi Kota Pekanbaru pada periode ini terdapat pada tahun 2013 dimana mencapai angka 8,83% yang jauh lebih tinggi dibandingkan inflasi nasional (6,40 %). Kota Pekanbaru dari tahun hingga 2023 mengalami fluktuasi yang cukup signifikan. Pada

tahun 2011 hingga 2014 inflasi cenderung tinggi bahkan mencapai angka 8,83% pada tahun 2013, tingginya inflasi ini menunjukkan adanya tekanan harga barang dan jasa, yang menjadi faktor utama dari melonjaknya inflasi saat itu ialah kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Kenaikan harga BBM di Indonesia tidak terkecuali Kota Pekanbaru yang memberikan konsekuensi penyesuaian harga pada berbagai sektor, kenaikan BBM dalam perekonomian masyarakat, sehingga menyebabkan daya beli masyarakat menurun. Dampak kenaikan BBM memberi andil pada inflasi sebesar 1,17% pada saat itu sehingga membuat harga beberapa komoditas lainnya merangkak naik, seperti tarif angkutan dalam kota memberikan andil inflasi sebesar 1,75%.

Pada tahun 2015 hingga 2021, inflasi di Pekanbaru mulai menurun dan lebih terkendali. Dimana pada tahun 2021 inflasi tercatat hanya 1,55% dan itu ialah angka terendah dalam 10 tahun terakhir. Rendahnya inflasi pada tahun ini dipengaruhi oleh perlambatan inflasi kelompok volatile food 1,15% tekanan ini disebabkan oleh kenaikan harga komoditas cabe rawit, ikan segar, tempe dan tahu mnetah kemudian seiring dengan tertahannya pasokan dan kenaikan harga komoditas global. Selanjutnya dipengaruhi oleh deflasi pada kelompok administered prices (-0,19%) yakni penurunan tarif angkutan, khususnya angkutan udara pasca libur akhir tahun sementara inflasi inti masih tercatat kenaikan.

Fenomena ini bisa terjadi dikarenakan adanya pemulihan permintaan konsumen, peningkatan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 10% ke 11%, tingginya PPN memungkinkan pengaruh setidaknya setengah dari inflasi dan berpotensi menyebabkan menurunnya daya beli masyarakat. Ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran inilah yang memperburuk tekanan inflasi diberbagai daerah termasuk di Kota Pekanbaru.

Sebagaimana diketahui pada tahun 2022 inflasi Kota Pekanbaru melampaui inflasi nasional dimana hingga mencapai angka 7,04% meningkat jauh lebih tinggi dari tahun sebelumnya, ini bisa terjadi akibat kenaikan BBM, dan kenaikan tarif parkir yang mencapai 100% untuk kendaraan roda dua dan kenaikan 50% untuk kendaraan roda 4. Dimana kenaikan tersebut terjadi di tahun yang sama yang menyebabkan terjadinya tekanan inflasi di Kota Pekanbaru. Peningkatan inflasi yang terjadi pada tahun ini ditujukan pemerintah untuk memenuhi target pertumbuhan ekonomi di atas 5%, namun apabila inflasi tinggi ini akan berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat, kenaikan PPN yang terjadi menyebabkan kenaikan pada harga pangan, BBM, hingga tarif pajak apabila daya beli

masyarakat melemah hal ini akan menjadi resiko sosial politik.

Namun secara rata-rata inflasi Pekanbaru selama 13 tahun terakhir lebih relatif rendah dan stabil dibandingkan inflasi nasional. Akan tetapi tetap saja inflasi masih menjadi permasalahan di Kota Pekanbaru, karena inflasi dapat mempengaruhi banyak variabel ekonomi seperti, ketimpangan, kemiskinan, dan penerimaan daerah. Dalam hal ini menjadi penting bagi pemerintah untuk memperhatikan perubahan makroekonomi, terutama inflasi dalam merumuskan kebijakan fiskal terkait penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Dalam upaya pembangunan daerah, pajak daerah dan retribusi daerah memberikan sumbangan yang besar dalam penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Pekanbaru. Faktor lainnya ialah PDRB yang merupakan salah satu tolak ukur untuk menilai baik buruknya pertumbuhan ekonomi suatu daerah.

Pada tabel 1.2. dapat dilihat pertumbuhan dan perkembangan pajak daerah, retribusi daerah, dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Kota Pekanbaru.

Tabel 1.2. Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan PDRB Kota Pekanbaru Tahun 2011-2023 (Dalam Miliar Rupiah)

Tahun	Pajak Daerah	Retribusi Daerah	PDRB
2011	145,09	54,37	48.192,14
2012	221,99	54,27	55.692,02
2013	370,92	75,43	60.492,46
2014	290,93	90,93	73.841,22
2015	357,42	58,81	83.663,98
2016	390,31	51,48	92.129,33
2017	491,41	56,86	101.113,42
2018	498,88	47,97	108.571,37
2019	620,95	35,97	118.763,89
2020	537,83	30,54	115.486,90
2021	587,50	23,16	126.525,25
2022	719,42	16,50	144.559,27
2023	719,58	25,56	159.960,67

Sumber :Data APBD Kota Pekanbaru, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan dan Badan Pusat Statistik, 2011- 2023

Pada tabel 1.2. dapat dilihat pajak daerah memiliki kontribusi yang lebih besar pada penerimaan pendapatan daerah dibandingkan retribusi daerah. Dimana penerimaan PDRB dan pajak daerah cenderung memiliki tren meningkat 13 tahun terakhir ini sedangkan penerimaan retribusi daerah memiliki tren menurun dalam 13 tahun tahun terakhir. Penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah sangat penting bagi pemerinth kota untuk

menjalankan roda pemerintahan, pelayanan masyarakat dan fungsi distribusi ekonomi yag lainnya seperti pembangunan infrastruktur. Adapun faktor yang mempengaruhi target penerimaan pajak daeah dan retribusi daerah yakni keadaan ekonomi makro negara salah satunya yakni inflasi. Fluktuasi inflasi ini dapat menimbulkan dampak positif ataupun negatif pada kegiatan perekonomian. Selain berpengaruh pada daya beli masyrakat yang menurun, juga dapat berpengaruh pada konsumsi masyarakat.

Dapat dilihat bahwa realisasi pajak daerah terjadi fluktuasi pada periode 2011-2023. Pada tahun 2011 hingga 2013 penerimaan pajak daerah relatif mengalami peningkatan dan melampaui target. Namun pada tahun 2014- 2023 relatif tidak mencapai target. Permasalahan yang terjadi dapat dilihat pada tahun 2014 disaat inflasi mencapai 8,53% realisasi pajak daerah mengalami penurunan pada total penerimaan 290,93 Milyar dari tahun sebelumnya yaitu 370,92 Milyar dan melampaui target yang ada hingga capaian sebesar 101,73%. Namun pada tahun 2022, saat inflasi kembali melonjak tinggi hingga 7,04% realisasi pajak daerah dan capaian target ikut naik mencapai total penerimaan 719,42 Milyar dengan capaian 96,85% dibanding tahun sebelumnya realisasi pajak daerah di angka 587,50 Milyar dengan capaian 71,73%.

Selanjutnya retribusi daerah yang merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang disediakan pemerintah kota. Kontribusi retribusi daerah terhadap PAD di Kota Pekanbaru tidak sebesar pajak daerah. Dimana penerimaan retribusi daerah Kota Pekanbaru memiliki tren menurun pada perode waktu tahun 2011-2023. Pada penerimaan retribusi daerah terlihat bahwa terjadi penurunan pada tahun 2011-2013. Jika dilihat saat inflasi tinggi (8,53%) di tahun 2014 realisasi pajak daerah turun dari tahun sebelumnya, namun pada realisasi retribusi daerah justru sebaliknya dimana pada tahun 2014 penerimaan retribusi mengalami peningkatan hingga 90,93 Milyar dari tahun sebelumnya 75,43 Milyar. Kemudian pada tahun selanjutnya saat inflasi mengalami penurunan, realisasi retribusi justru terus mengalami penurunan hingga tahun 2022 menjadi 16,50 Milyar pada inflasi tinggi yang terjadi di tahun ini. Namun pada penurunan inflasi di tahun 2023 menjadi 2,50% realisasi retribusi terjadi peningkatan dari tahun sebelumnya menjadi 25,56 Milyar.

Penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah sangat penting bagi pemerintah kota untuk menjalankan roda pemerintahan, pelayanan masyarakat, dan juga untuk fungsi distribusi ekonomi yang lainnya seperti pembangunan infrastruktur. Adapun faktor yang mempengaruhi

target penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah yakni keadaan ekonomi makro negara salah satunya yaitu inflasi. Fluktuasi inflasi ini dapat menimbulkan dampak positif ataupun negatif pada kegiatan perekonomian. Selain berpengaruh pada daya beli konsumsi masyarakat, investasi dan ekspor impor juga berdampak pada salah satu kebijakan fiskal seperti penerimaan pendapatan daerah.

PDRB merupakan cerminan dari pertumbuhan ekonomi yang dipengaruhi oleh berbagai faktor. Pertumbuhan ekonomi yang dicerminkan dari perubahan PDRB diartikan adanya penambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada pada suatu wilayah dalam kurun waktu setahun. Dimana pada tahun 2011 nilai PDRB sebesar 49,19 Miliar Rupiah terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun hingga tahun 2019 PDRB Kota Pekanbaru mencapai 118,76 Miliar Rupiah. Dan terjadi penurunan pada tahun 2020 dari tahun sebelumnya dimana turun hingga 115,48 Miliar Rupiah hal ini dipengaruhi adanya pergeseran struktur ekonomi dan melambatnya aktivitas perdagangan akibat pandemi COVID-19. Kemudian nilai PDRB atas dasar harga berlaku tahun 2023 sebesar 159,96 Miliar Rupiah, dimana angka ini meningkat dari tahun 2021 sebesar 126,52 Miliar Rupiah dan 2022 sebesar 144,55 Miliar Rupiah. Maka dapat diartikan selama tahun 2023, perekonomian di Kota Pekanbaru tumbuh sebesar 6,06%.

Perekonomian Kota Pekanbaru tahun 2023 meningkat namun peningkatannya melambat dari tahun sebelumnya, hal ini dikarenakan adanya penurunan sumber pertumbuhan ekonomi yang berasal dari kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, hal ini dikarenakan jumlah pembelian kendaraan tumbuh positif namun tidak setinggi tahun sebelumnya dan diikuti meningkatnya aktivitas di pasar tradisional dan pasar modern.

Sumber pertumbuhan ekonomi berasal dari lapangan usaha Konstruksi (30,68%) dan perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor (30,62%) memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian di Kota Pekanbaru yakni sebesar 61,31%. Kemudian, industri pengolahan sebesar 20,14% pada tahun 2023. Apabila ketiga sektor ini mengalami peningkatan aktivitas ekonomi, maka perekonomian di Kota Pekanbaru juga ikut tumbuh membaik. Sedangkan peranan empat belas kategori lainnya dibawah 4%.

Berdasarkan penelitian terdahulu Berutu, *et al* (2023) mendapatkan hasil yang menunjukkan bahwa inflasi dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak daerah. Hal ini menunjukkan apabila inflasi meningkat maka pendapatan pajak daerah juga cenderung naik. Kondisi ini terjadi karena inflasi mendorong kenaikan harga barang dan jasa sehingga memperbesar basis pajak dari berbagai transaksi ekonomi yang mengenakan pajak atau PPN. Dalam penelitiannya juga menatakan bahwa masih banyak variabel lain selain inflasi dan pertumbuhan ekonomi yang mempengaruhi penerimaan pajak daerah yakni PDRB, jumlah industri, pendapatan per kapita, dan investasi. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan Rokhayatim, *et al* (2022) mendapatkan hasil bahwa inflasi tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah hal ini dapat disebabkan dikarenakan fungsi pajak yang tidak hanya sebagai penghimpun penerimaan, namun pajak juga menjalankan fungsi stabilisasi.

Berdasarkan dari fenomena yang telah dipaparkan, maka penulis tertarik untuk mengangkat judul “Pengaruh Inflasi terhadap Penerimaan Pajak daerah dan Retribusi Daerah melalui Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebagai Variabel Intervening Kota Pekanbaru Tahun 2011-2023” untuk mengetahui bagaimana inflasi itu memengaruhi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah, apakah dengan tingginya inflasi akan memberikan dampak pada peningkatan PPN sehingga berpengaruh positif terhadap penerimaan daerah atau justru inflasi dapat menyebabkan menurunnya daya beli masyarakat sehingga berpengaruh negatif terhadap penerimaan daerah di Kota Pekanbaru yakni penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah.

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan menggunakan data sekunder berdasarkan deret waktu atau disebut *time series* yang diambil dari laporan dan dokumen resmi serta laporan kinerja instansi pemerintah dari Kota Pekanbaru dan data APBD dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dan data inflasi dari BPS.

Penelitian ini menggunakan Inflasi sebagai variabel independen, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai variabel dependen serta Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebagai variabel intervening.

Adapun model yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu analisis jalur (*path analysis*) dengan melakukan 3 tahap. Pertama, model regresi linear sederhana untuk menguji pengaruh PDRB terhadap inflasi. Kedua, model analisis regresi

berganda untuk menguji pengaruh PDRB dan inflasi terhadap Pajak Daerah. Ketiga, Kedua, model analisis regresi berganda untuk menguji

Variabel	Asymp. Sig. (2-Tailed)	Keputusan
Model II X, Z, Y1	0,253	Tidak Terdapat Gejala Autokorelasi
Model III X, Z, Y2	0,084	Tidak Terdapat Gejala Autokorelasi

pengaruh PDRB dan inflasi terhadap Retribusi Daerah .

Berikut ialah model persamaan regresi linear hubungan antar variabel penelitian.

- Model Struktural I  
 $Z = \alpha + b_1x + e_1$
- Model Struktural II  
 $Y_1 = \alpha + b_2x + e_2$
- Model Struktural III  
 $Y_2 = \alpha + b_3x + e_3$

Keterangan :

Z : Product Regional Domestic Bruto (PDRB)  
x : Inflasi  
Y<sub>1</sub> : Pajak daerah  
Y<sub>2</sub> : Retribusi daerah  
 $\alpha$  : Nilai konstanta  
b : Koefisien regresi

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Uji asumsi Klasik

Tabel 1. Hasil Uji Normalitas

Variabel	Asymp. Sig (2 –tailed)	Keputusan
Model I X, Z	0,200	Normal
Model II X, Z, Y1	0,200	Normal
Model III X, Z, Y2	0,200	Normal

Sumber : Olahan data SPSS, 2025

Berdasarkan hasil uji normalitas dengan menggunakan uji *One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test* dapat disimpulkan bahwa pengolahan data pada variabel inflasi (X), PDRB (Z), pajak daerah (Y1) dan retribusi daerah (Y2) berdistribusi secara normal dimana nilai signifikansi *Asymp. Sig. (2 tailed)* sebesar  $0,200 > 0,05$ .

### Uji Multikolinearitas

Tabel 2. Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF

Model II	X, Z, Y1	0,879	1,138
Model III	X, Z, Y2	0,879	1,138

Sumber : Olahan data SPSS, 2025

Berdasarkan hasil uji multikolieritas diketahui bahwa nilai VIF model regresi  $1,138 < 10$  dan nilai *tolerance*  $0,879 > 0,01$  maka dari nilai tersebut artinya tidak terjadi multikolineritas pada masing-masing variabel pada model.

### Uji Autokorelasi

Tabel 3. Hasil Uji Autokorelasi

Sumber : Olahan data SPSS, 2025

Berdasarkan hasil uji autokorelasi, diketahui nilai *Asymp. Sig (2-Tailed)* dari kedua model sebesar  $0,253$  dan  $0,084 > 0,05$  maka artinya tidak terdapat gejala autokorelasi pada masing-masing variabel.

### Hasil Regresi Linear Sederhana Model I

Tabel 4. Hasil Regresi Model Struktural I

Coefficients <sup>a</sup>					
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	
		B	Std. Error	Beta	
1	(Constant)	119.701	19.120		6.260
	Inflasi	-1.933	1.007	-.348	-1.169

a. Dependent Variable: PDRB

Sumber : Olahan data sekunder SPSS, 2025

Berdasarkan hasil variabel inflasi yang mempengaruhi PDRB dalam bentuk persamaan regresi sebagai berikut :

$$Z = 119,701 - 1,933X$$

Maka dapat disimpulkan, persamaan regresi sederhana menunjukkan adanya pengaruh negatif antara inflasi (X) terhadap PDRB (Z). Model pertama, dapat diinterpretasikan bahwa nilai inflasi konstan maka nilai PDRB mengalami peningkatan sebesar 119,701. Kemudian apabila nilai inflasi meningkat 1% maka PDRB akan mengalami penurunan 1,933 Miliar Rupiah. Hal ini dikarenakan inflasi yang tinggi dapat menekan konsumsi dan investasi sehingga cenderung dapat menurunkan PDRB.

### Hasil Regresi Linear Berganda Model II

Tabel 5. Hasil Regresi Model Struktural II

Coefficients <sup>a</sup>					
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	Sig.
		B	Std. Error	Beta	
1	(Constant)	-100.904	56.734		.109
	Inflasi	8.320	5.657	.108	.205
	PDRB	5.289	.420	1.004	.000

a. Dependent Variable: Pajak daerah

Sumber: Olahan data sekunder, 2025

Berdasarkan hasil variabel inflasi,PDRB yang mempengaruhi pajak daerah dalam bentuk persamaan regresi sebagai berikut :

$$Y1 = -100,904 + 8,320X + 5,289Z$$

Maka dapat disimpulkan, persamaan regresi berganda menunjukkan adanya pengaruh positif antara inflasi (X) dan PDRB (Z) terhadap pajak daerah (Y1). Model kedua, dengan nilai konstanta -100,904 maka dapat diinterpretasikan bahwa apabila nilai inflasi dan PDRB konstan maka penerimaan pajak daerah bernilai negative. Maka ini berarti bahwa ada faktor lain diluar inflasi dan PDRB yang berkontribusi terhadap penerimaan pajak daerah. secara teori penerimaan pajak juga dipengaruhi oleh efektivitas administrasi pajak, tingkat kepatuhan pajak dan intensitas pengawasan. Jika pemerintah meningkatkan digitalisasi sistem pajak bisa meningkat.

Kemudian apabila nilai inflasi meningkat 1% maka pajak daerah akan mengalami peningkatan 8,320 Miliar Rupiah. Hal ini menunjukkan pengaruh positif terhadap penerimaan pajak daerah dikarenakan kenaikan harga barang dan jasa yang terjadi akan meningkatkan nilai nominal pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah. Selanjutnya, jika nilai PDRB mengalami peningkatan 1 miliar rupiah maka akan menaikkan penerimaan pajak daerah sebesar 5,289 Miliar Rupiah. Pengaruh yang bersifat positif dikarenakan semakin besar aktivitas ekonomi suatu daerah yang dicerminkan dari total PDRB yang menunjukkan peningkatan produksi dan pendapatan masyarakat maka semakin besar pula potensi penerimaan pajak daerah yang diterima pemerintah.

### Hasil Regresi Linear Berganda Model III

Tabel 6. Hasil Regresi Model Struktural III

Coefficients <sup>a</sup>					
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	Sig.
		B	Std. Error	Beta	
1	(Constant)	71.043	12.377		.000
	Inflasi	3.189	1.793	.430	.017
	PDRB	-.404	.094	-.648	.002

a. Dependent Variable: Retribusi daerah

Sumber : Olahan data sekunder, 2025

Berdasarkan hasil variabel inflasi,PDRB

yang mempengaruhi pajak daerah dalam bentuk persamaan regresi sebagai berikut :

$$Y2 = 71,043 + 3,189X - 0,404Z$$

Maka dapat disimpulkan, persamaan regresi berganda menunjukkan adanya pengaruh positif antara inflasi (X) dan PDRB (Z) terhadap retribusi daerah (Y2). Model pertama, dapat diinterpretasikan bahwa nilai inflasi dan PDRB konstan maka penerimaan retribusi daerah mengalami peningkatan sebesar 71,043.

Kemudian, apabila nilai inflasi meningkat 1% maka penerimaan retribusi daerah akan mengalami peningkatan 3,189 Miliar Rupiah. Hal ini menunjukkan pengaruh positif inflasi terhadap retribusi daerah. Kenaikan harga barang dan jasa yang menyebabkan tarif retribusi yang dikenakan oleh pemerintah pun cenderung naik. Misalnya pada retribusi parkir tepi jalan umum dinaikkan mengikuti kenaikan biaya operasional.

Selanjutnya, didapatkan hasil koefisien PDRB sebesar -0,404, maka dapat diartikan apabila nilai PDRB meningkat sebesar 1 miliar rupiah, maka akan menurunkan penerimaan retribusi daerah sebesar 0,404 miliar rupiah. Pengaruh yang negatif antara variabel PDRB terhadap retribusi daerah dikarenakan ada kemungkinan adanya kebijakan pemerintah daerah yang mengurangi pungutan retribusi seiring dengan pertumbuhan ekonomi.

### Hasil Uji Parsial

Tabel 7. Hasil uji t

Variabel	Sig	Keputusan
Inflasi -> PDRB	0,002	Signifikan
Inflasi -> Pajak daerah	0,205	Tidak signifikan
PDRB -> Pajak daerah	0,000	Signifikan
Inflasi -> Retribusi daerah	0,017	Signifikan
PDRB -> Retribusi daerah	0,002	Signifikan

Sumber : Olahan data SPSS,2025

Berdasarkan hasil uji t, diperoleh t tabel dengan signifikansi < 0,05 maka didapatkan hasil. Pertama, inflasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pajak daerah. Kedua, inflasi berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pajak daerah. Ketiga, PDRB berpengaruh positif signifikan terhadap pajak daerah. Keempat, inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap retribusi daerah. Kelima, PDRB berpengaruh negatif dan signifikan terhadap retribusi daerah.

### Uji R

Tabel 8. Hasil Uji R

	Variabel	R Square
Model I	X, Z	0,121
Model II	X, Z, Y1	0,944
Model III	X, Z, Y2	0,799

Sumber : Olahan data, 2025

Uji R dilakukan untuk melihat sebesarapa besar variasi antar variabel. Semakin mendekati nilai 1, maka semakin baik model regresi dalam menjelaskan hubungan antar variabel.

### Uji F

Tabel 9. Hasil Uji F

	Variabel	Signifikansi	Keputusan
Model I	X, Z	0,000 < 0,05	Signifikan
Model II	X, Z, Y1	0,000 < 0,05	Signifikan
Model III	X, Z, Y2	0,000 < 0,05	Signifikan

Sumber : Olahan data, 2025

Uji F dilakukan untuk menguji arti regresi dalam sebuah penelitian dengan menggunakan uji F dengan tabel anova. Uji F bertujuan untuk menunjukkan apakah variabel independen dalam sebuah model regresi memiliki pengaruh terhadap variabel dependen. Apabila tingkat sig < 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa variabel independen signifikan terhadap variabel dependen.

### Hasil Uji Sobel

Dalam penelitian ini, yakni pengaruh inflasi (X) terhadap pajak daerah (Y1) dan retribusi daerah (Y2) melalui variabel PDRB (Z) sebagai variabel intervening. Adapun perhitungannya sebagai berikut :

$$z = \frac{ab}{\sqrt{(b^2 Sa^2) + (a^2 Sb^2) + (Sa^2 Sb^2)}}$$

Pengaruh tidak langsung inflasi terhadap pajak daerah melalui variabel PDRB sebagai variabel intervening.

$$z = \frac{-1,933 \times 5,289}{\sqrt{(5,289^2 \times 1,007^2) + (-1,933^2 \times 0,420^2) + (1,007^2 \times 0,420^2)}}$$

$$z = \frac{-10,2236}{\sqrt{29,2045}}$$

$$z = \frac{-10,2236}{5,4041}$$

$$z = -1.897643$$

Pengaruh tidak langsung inflasi terhadap retribusi daerah melalui variabel PDRB sebagai variabel intervening.

$$Z = \frac{(-1,933) \times (-0,404)}{\sqrt{(-0,404^2 \times 1,007^2) + (-1,933^2 \times 0,094^2) + (1,007^2 \times 0,094^2)}}$$

$$Z = \frac{0,7809}{\sqrt{0,2074}}$$

$$Z = \frac{0,7809}{0,4555}$$

$$Z = 1,752694$$

Berdasarkan hasil perhitungan di atas, diambil kesimpulan apabila nilai z hitung > z tabel (1,96) dan p-value < 0,05 maka hasil uji sobel tersebut signifikan, maka dari hasil tersebut dapat dilihat kesimpulan hasil uji sobel, sebagai berikut.

### Analisis Jalur

Tabel 10. Kesimpulan Hasil Analisis Jalur

No	Variabel	Pengaruh langsung	Pengaruh tidak langsung	Pengaruh total
1	X → Z	-1,933		
2	X → Y1	8,320		
3	Z → Y1	5,289		
4	X → Y2	3,189		
5	Z → Y2	-0,404		
6	X → Z → Y1		(-1,933 x 5,289) = -10,223	
7	X → Z → Y2		(-1,933 x -0,404) = 1,752	
8	(1) + (6)			-1,933 + -10,223 = -12,156
9	(1) + (7)			-1,933 + 1,752 = -0,181

Sumber : Olahan data, 2025

Berdasarkan analisis jalur, besarnya pengaruh langsung dari variabel inflasi terhadap variabel pajak daerah sebesar 8,320. Sedangkan pengaruh tidak langsung dari inflasi terhadap pajak daerah melalui variabel PDRB sebesar P1 x P3 (-1,933 x 5,289) = -10,2236). Dengan demikian diperoleh pengaruh langsung sebesar 8,320 lebih besar daripada pengaruh tidak langsung sebesar -10,2236.

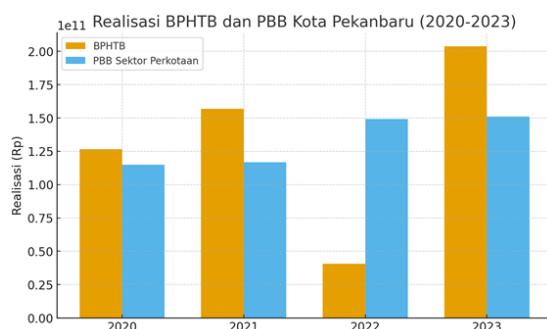
Besarnya pengaruh langsung inflasi terhadap retribusi daerah sebesar 0,430. Sedangkan pengaruh tidak langsung inflasi terhadap retribusi daerah melalui variabel PDRB dihitung dari P4 x P6 (-1,933) x (-0,404) = 1,752694). Dengan demikian diperoleh pengaruh langsung sebesar 3,189 lebih besar daripada pengaruh tidak langsung sebesar 1,752694.

### Pengaruh Inflasi terhadap Pajak Daerah Melalui PDRB

Berdasarkan dari hasil pengujian statistik dapat dilihat bahwa inflasi erpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap penerimaan pajak daerah di Kota Pekanbaru tahun 2011-2023. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Eko, *et al* (2018) yang memperoleh hasil positif namun tidak signifikan terhadap pajak daerah karena inflasi merupakan kondisi ekonomi makro yang berlangsung dalam jangka panjang. Sukirno (2009:9) menyatakan selain inflasi ada hal lain yang akan selalu dihadapi oleh suatu negara maupun daerah yakni masalah pertumbuhan ekonomi, ketidakstabilan ekonomi dan pengangguran.



Berdasarkan penelitian terdahulu, tingkat inflasi akan berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah secara parsial apabila ada variabel lain dalam sebuah penelitian. Variabel tersebut bisa dari PDRB. Adapun pengaruh PDRB terhadap pajak daerah memperoleh koefisien sebesar 5,289 yang menunjukkan setiap peningkatan PDRB 1 miliar rupiah maka akan meningkatkan penerimaan pajak daerah sebesar 5,289 miliar rupiah. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan Mongdong, *et al* (2023) dimana dapat dijelaskan ketika PDRB mengalami peningkatan maka akan meningkatkan penerimaan pajak daerah. Hal ini bisa terjadi disebabkan oleh dari PDRB akan menambah penerimaan pemerintah kota untuk program pembangunan daerah yang nantinya akan mendorong peningkatan pemerintah terhadap masyarakat yang akhirnya akan meningkatkan aktivitas ekonomi yang mengenakan pajak daerah. Adapun dampak dari meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita masyarakat juga akan mendorong pembangunan suatu daerah. Sebagaimana yang didapatkan data realisasi pajak daerah Kota Pekanbaru yang dilihat dari tahun 2020-2023, menunjukkan bahwa sumber pajak yang memiliki kontribusi paling besar terhadap pajak daerah ialah BPHTB dan PBB sektor perkotaan.



Gambar 1. Grafik Realisasi BPHTB dan PBB Kota Pekanbaru Tahun 2020-2023

Pada tahun 2023, BPHTB mencapai Rp. 203.808.708.196,00 yang menunjukkan kenaikan yang signifikan dibanding tahun sebelumnya. Kenaikan ini disebabkan oleh adanya peningkatan aktivitas jual beli properti dan pembangunan perumahan baru yang mendorong tingginya penerimaan pajak daerah pada objek pajak BPHTB. Kemudian PBB Perkotaan juga memberi kontribusi besar dan mengalami tren meningkat dimana realisasinya mencapai Rp. 151.017.226.127,00 di tahun 2023. Hal ini mencerminkan peningkatan kewajiban wajib pajak serta optimalisasi data objek pajak oleh pemerintah daerah. Hubungannya dengan kenaikan PDRB mencerminkan adanya peningkatan pendapatan masyarakat sehingga kemampuan ekonomi untuk memenuhi kewajiban membayar

pajak menjadi lebih baik. Peningkatan PDRB ini berimplikasi pada tingginya daya beli dan kesejahteraan masyarakat yang selanjutnya memperkuat basis penerimaan pajak daerah melalui kepatuhan wajib pajak secara berkelanjutan.

Berdasarkan analisis jalur didapatkan hasil pengaruh langsung inflasi terhadap penerimaan pajak daerah lebih besar dibandingkan pengaruh tidak langsung melalui PDRB, yakni pengaruh langsung sebesar 8,320 dan pengaruh tidak langsung sebesar -10,223. Pengaruh yang lebih kecil dari PDRB tidak terlalu berdampak terhadap penerimaan pajak daerah. Hal ini bisa terjadi dikarenakan harga barang dan jasa yang meningkat juga akan meningkatkan penerimaan pajak daerah seperti pajak hiburan, pajak restoran, dan pajak hotel. Dimana, Kota Pekanbaru merupakan pusat perekonomian di Provinsi Riau yang memiliki sektor perdagangan dan jasa yang selalu berkembang sehingga kenaikan harga barang tidak terlalu menghambat konsumsi melainkan dapat meningkatkan pendapatan nominal masyarakat para pelaku usaha sehingga mereka memiliki daya beli yang lebih tinggi sehingga berkontribusi pada kenaikan tarif pajak dari berbagai sektor ekonomi.

### Pengaruh Inflasi terhadap Retribusi Daerah melalui PDRB

Berdasarkan hasil uji statistik diperoleh pengaruh inflasi terhadap retribusi daerah secara langsung diperoleh hasil bahwa inflasi berpengaruh positif terhadap retribusi daerah dan PDRB berpengaruh negatif terhadap retribusi daerah. Dalam penelitian ini PDRB berpengaruh negatif terhadap penerimaan retribusi daerah. Namun, pengaruh langsung inflasi terhadap penerimaan retribusi daerah berpengaruh positif. Hal ini dapat dilihat pada grafik data di bawah ini.



Gambar 2. Grafik Perkembangan Inflasi dan Realisasi Retribusi Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2011-2023

Pada grafik tersebut dapat dilihat pada tahun 2013 dan 2014 disaat inflasi tinggi, realisasi retribusi daerah pada tahun tersebut juga ikut melonjak. Dimana tahun 2013 realisasi retribusi daerah sebesar 75,43 Miliar Rupiah, kemudian di tahun selanjutnya



disaat inflasi masih tinggi realisasi retribusi daerah mencapai hingga 90,93 Miliar Rupiah. Hal ini menunjukkan bahwa disaat tekanan harga meningkat justru meningkatkan aktivitas ekonomi serta perputaran barang dan jasa serta pelayanan publik yang dikenakan retribusi ikut mengalami peningkatan sehingga mendorong pertambahan realisasi retribusi daerah.

Selanjutnya, pada rentang tahun 2015 hingga 2021 dimana inflasi relatif rendah dan stabil realisasi retribusi daerah dari tahun ke tahun mengalami penurunan. Dimana pada tahun 2021 inflasi tercatat pada angka 1,55%, realisasi retribusi daerah sebesar 23,16 Milyar Rupiah. Meskipun terdapat korelasi yang negatif pada tahun 2022 yakni penurunan realisasi retribusi daerah saat inflasi tinggi (7,04%), fenomena ini dapat dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti pandemi ataupun penyesuaian kebijakan fiskal pada saat itu. Namun secara umum, inflasi memiliki korelasi yang positif terhadap realisasi retribusi daerah di Kota Pekanbaru.

Hal ini dapat terjadi dikarenakan apabila inflasi terjadi menyebabkan nilai nominal dari berbagai pemungutan retribusi daerah seperti retribusi jasa umum, jasa usaha, dan perizinan tertentu juga ikut meningkat. Maka dari itu, meskipun volume transaksi atau permintaan jasa tetap, penerimaan dari pungutan retribusi akan cenderung bertambah dikarenakan tarif yang dikenakan berdasarkan harga yang terus menyesuaikan dengan kondisi inflasi.

Berdasarkan hasil penelitian ini, pengaruh PDRB terhadap realisasi retribusi daerah, diperoleh PDRB berpengaruh negatif terhadap realisasi retribusi daerah. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan Khairiroh (2023). Dimana dalam penelitian tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap penerimaan retribusi.

Adapun yang menjadi faktor penghambat dalam penerimaan retribusi daerah, salah satunya dikarenakan banyaknya tempat hiburan yang belum memiliki izin resmi sementara perkembangan usaha dibidang hiburan kota Pekanbaru terus bertumbuh dan berkembang. Untuk menjelaskan hubungan negatif antara PDRB terhadap penerimaan retribusi daerah ini dapat dipengaruhi dari penurunan yang besar pada retribusi izin mendirikan bangunan (IMB). Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang mendorong aktivitas ekonomi seperti pembangunan dapat menurunkan penerimaan retribusi dari sisi perizinan tertentu. Faktor dari penurunan ini diakibatkan karena adanya perubahan harmonisasi hubungan keuangan pusat dan daerah berdasarkan UU HKPD No.1 Tahun 2022 terkait

pengelolaan retribusi IMB dan potensi pendapatan lainnya dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang belum selesai rangkum sehingga menghambat *developver* untuk mengajukan izin mendirikan bangunan seperti pembangunan perumahan. Berdasarkan UU Nomor 1 tentang hubungan keuangan pusat dan daerah, daalam pasal 88 ayat (1) dan (2) menyatakan pemerintah yang mengurangi beberapa layanan retribusi seiring dengan adanya perkembangan ekonomi daerah seperti layanan kesehatan, layanan parkir tepi jalan umum dan layanan kebersihan apabila potensi penerimaannya kecil, untuk kesejahteraan masyarakat. Maka dari itu, pemerintah lebih fokus dan mengandalkan pendapatan daerah dari pajak daerah.

Dapat diketahui dapat dilihat bahwa penerimaan pelayanan parkir tepi jalan umum juga memberikan kontribusi yang besar dalam pendapatan retribusi daerah dimana penerimaannya sejak tahun 2011 hingga tahun 2023 terus mengalami peningkatan terkecuali tahun 2019-2020 karena terdampak dari pandemi covid-19 yang menyebabkan masyarakat mengurangi aktivitas keluar rumah. Namun, jika dilihat secara keseluruhan penerimaan parkir tepi jalan umum memberikan kontribusi yang besar dalam penerimaan pendapatan daerah. Oleh sebab itu, salah satu faktor yang menyebabkan penerimaan retribusi daerah turun dikarenakan pelayanan parkir tepi jalan umum sudah tidak lagi termasuk dalam objek retribusi daerah sejak tahun 2021 dan termasuk dalam pendapatan Badan Layann Umum Daerah (BLUD).

Kemudian, yang menjadi faktor penurunan penerimaan retribusi daerah yakni retribusi layanan kesehatan yang sudah tidak termasuk dalam objek retribusi daerah. Dimana pendapatan yang diterima oleh puskesmas, RS Madani dan retribusi pelayanan kesehatan menyumbang Rp. 26.723.762.777 pada tahun 2022 yang sudah termasuk pada pendapatan BLUD, tentu hal ini juga menyebabkan penurunan realisasi retribusi daerah.

Berdasarkan dilakukan analisis jalur untuk mengetahui pengaruh langsung dan tidak langsung antara inflasi dengan penerimaan retribusi daerah melalui variabel PDRB. Dimana diperoleh hasil bahwa pengaruh langsung antara inflasi terhadap retribusi lebih besar dari pengaruh tidak langsung melalui variabel PDRB. Hal ini mengartikan bahwa kontribusi PDRB yang tidak terlalu berdampak pada penerimaan retribusi daerah.

## KESIMPULAN

Hasil analisis data dari penelitian dengan judul “Pengaruh Inflasi terhadap Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan *Product Domestic*

*Regional Bruto (PDRB)* sebagai Variabel Intervening di Kota Pekanbaru Tahun 2011-2023” yang telah dilakukan memiliki beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- Inflasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap PDRB di Kota Pekanbaru tahun 2011-2023.
- Inflasi berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap penerimaan pajak daerah di Kota Pekanbaru pada tahun 2011-2023.
- PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak daerah di Kota Pekanbaru pada tahun 2011-2023.
- Inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan retribusi daerah di Kota Pekanbaru pada tahun 2011-2023.
- PDRB berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penerimaan pajak daerah di Kota Pekanbaru pada tahun 2011-2023.

#### **Saran**

Berdasarkan temuan pada penelitian ini, dimana pengaruh langsung inflasi terhadap penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah dibandingkan pengaruh tidak langsung melalui PDRB. Maka hal yang juga perlu diperhatikan adalah menjaga inflasi tetap stabil, sehingga PDRB yang seharusnya lebih berdampak pada penerimaan pajak daerah bukan inflasi yang dapat meningkatkan pajak daerah tersebut. Karena secara berkala dapat beresiko terhadap menurunnya daya beli dan konsumsi masyarakat sehingga dapat mengurangi kemampuan masyarakat. Karena kebijakan fiskal yang tidak memperhatikan tekanan inflasi akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi.

Pengaruh antara variabel intervening terhadap variabel dependen yang masih rendah mengartikan bahwa masih banyak faktor lain diluar model penelitian ini yang mempengaruhi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah. untuk peneliti selanjutnya disarankan menambahkan variabel lain agar hasil penelitian dan periode waktu agar lebih akurat.

#### **Ucapan Terima Kasih**

Puji syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Mahesa Esa atas berkat dan anugrah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Terkhusus penulis sampaikan terimakasih sebesar-besarnya kepada orang tua penulis yang sangat penulis sayangi Alm. Ayahanda Raja Amhar yang tetap menjadi penyemangat penulis dan Ibunda Nurseha yang selalu memberikan doa, semangat, dukungan pribadi secara materil dan kasih sayang yang tak pernah putus kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi.

Penulis sampaikan terimakasih kepada Bapak Prof. Syapsan, SE., ME dan Bapak Darmayuda, SE., M.Si selai dosen pembimbing penulis yang telah membantu penulis dalam membimbing peneliti selama proses pengerjaan skripsi.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Amin, M.A.N. (2023), “Analisis Efektifitas Pendapatan Pajak Hotel Kabupaten Tegal di Masa Pandemi Covid-19”, *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen Dan Akuntansi (JEBMA)*, Vol.2 No.3, pp. 153–162, doi: 10.47709/jebma.v2i3.1996.
- Astiyah, S.S. (2009), “*Inflasi*”, Pusat Pendidikan Dan Studi Kebanksentralan (PPSK), Vol. 22 No. 22, pp. 1–68.
- Berutu, M.I.A. and Kuntadi, C. (2023), “Pengaruh Jumlah Penduduk, Tingkat Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penerimaan Pajak Daerah”, *INNOVATIVE: Journal of Social Science Reseach*, Vol. 3 No. 4, pp. 4751
- Eko, P. and Sunardi, R. (2018), “Pengaruh Tingkat Inflasi Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Di Kota Bandung Periode 2008 Sd 2017”, *Akuntansi Dan Keuangan*, No. 0, pp. 38–46.
- Firman Bayu Aji (2021). “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pajak Daerah Kota Semarang. Diponegoro Journal Of Economics.ISSN (Print) : 2337-3814
- Rohkhatyati, J.P. and Setiawan, B. (2022), “Pengaruh Realisasi Anggaran, Law Enforcement, Tingkat Kepatuhan, Dan Tingkat Inflasi Terhadap Penerimaan Pajak”, *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, Vol. 9 No. 1.
- Panglipurningrum, Nahzat, and Yenni Khristiana (2021). “The Impact of Monetary Policy and Fiscal Policy on Budget Deficit in Vietnam : Based on Ricardian Equivalent Theory”. *European Journal of Scientific Research*. March 2021
- Oktiani, A. (2021), “Pengaruh Jumlah Penduduk dan Inflasi Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sumatera Selatan”, *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Perencanaan Pembangunan*, Vol. 1 No. 1, pp. 16–35.
- Sukirno (2015), “*Makroekonomi Teori Pengantar Edisi Ketiga*” Jakarta : PT Raja Grafindo Persada